

PENGEMBANGAN SEKTOR TRANSPORTASI UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS KABUPATEN PULANG PISAU

Budi Sitorus

STMT Trisakti

budi_dephub@yahoo.co.id

Christina N Sitorus

STMT Trisakti

kitin_maniez@yahoo.com

ABSTRACT

Pisau Regency is a regency division that has been 14 years separated from Kapuas, face issues such as human resources have not been adequate, the need to improve infrastructure transport sector, the availability of electricity and the availability of roads in good condition, the availability of communications networks and information, these can not be materialized due to the availability of a limited budget. Data were collected through literature study, the results of research and related scientific publications. Analysis by public policy analysis in the framework of the increasing accessibility Pisau district. The purpose of research is to identify the potential Pisau Regency on demand transport sector, regional development policy analysis Pisau Regency. Benefits of the research is to provide policy advice to improve accessibility Pisau Regency.

Keywords: *Accessibility and Regional Development*

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan kebutuhan turunan dari kebutuhan utama masyarakat. Selain sebagai alat perpindahan orang dan barang, transportasi memiliki peran menghubungkan daerah (terpencil, tertinggal, dan perbatasan), meningkatkan pembangunan sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta pemersatu Negara Kesatuan RI. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah diperlukan perencanaan dari tata ruang wilayah dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Kabupaten Pulang Pisau merupakan kabupaten pemekaran pada 1999 dari Kabupaten Kapuas. Kabupaten Pulang Pisau yang beribukota di Pulang Pisau memiliki luas 8.997 km² atau 5,85% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah 153.564 km² yang terbagi dalam 94 Kelurahan dan 8 Kecamatan, di

antaranya Kecamatan Kahayan Kuala, Pandih Batu, Maluku, Kahayan Hilir, Kahayan Tengah, Banama Tingang, Jabiren Raya, dan Sebangau Kuala, serta berpenduduk 120.062 jiwa (BPS, 2010). Dampak dari pemekaran tersebut, Kabupaten Pulang Pisau dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain sumber daya manusia, perlunya peningkatan infrastruktur transportasi, tersedianya jaringan jalan dengan kualitas baik dan tersedianya cadangan energi listrik yang cukup. Hal tersebut belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Dalam hal ini, sebagai penunjang kegiatan perekonomian masyarakat saat ini tersedia 1 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Pulang Pisau yang melintasi Sungai Sebangau. Sungai Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau dengan panjang 200 km², lebar 100 m, kedalaman 5 m dapat dilayari 150 km. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau Juni 2016, jumlah penumpang angkutan laut tercatat 14.053 orang, terdiri dari 7.082 orang datang dan 6.971 orang berangkat. Dibandingkan Mei 2016, jumlah penumpang datang dan berangkat mengalami penurunan, masing-masing 24,88% dan 22,42%. Arus lalu lintas barang melalui angkutan laut tercatat 1,16 juta ton, naik 0,17 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan terjadi pada volume bongkar barang sebesar 19,68 persen, sedangkan volume muat barang turun 8,25 persen. Dibandingkan Mei 2016, jumlah kedatangan penumpang melalui angkutan udara turun 5,26 persen menjadi 56.918 orang. Penurunan juga terjadi pada jumlah keberangkatan penumpang sebesar 2,70 persen menjadi 60.180 orang. Jumlah frekuensi penerbangan turun 4,38 persen, dari 1.828 penerbangan di Maret 2016 menjadi 1.748 penerbangan di April 2016. Dibandingkan April 2015, terjadi penurunan 7,61 persen di April 2016. Jumlah penumpang dan arus lalu lintas barang melalui bandar udara masing-masing turun 3,96 persen dan 1,89 persen dibandingkan bulan Mei 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transportasi selain memindahkan orang dan barang, memiliki peran penting untuk menghubungkan antar pulau, membuka keterisolasian wilayah, serta diharapkan menumbuhkan permintaan dan penawaran transportasi di wilayah tersebut. Pada 2012 penduduk Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 122.511 jiwa, yang terdiri atas 63.699 laki-laki dan 58.812 perempuan dengan luas wilayah 8.997 km². Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Maluku adalah dua kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 26.813 jiwa dan 23.374 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pulang Pisau adalah sebanyak 14 orang per km². Dilihat dari distribusi penduduk menurut kecamatan,

kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Kahayan Hilir yaitu 74 penduduk per km², diikuti Kecamatan Maliku sebanyak 57 penduduk per km². Sementara kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Sebangau Kuala, hanya 2 (dua) penduduk per km². Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Pulang Pisau 2012 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Pulang Pisau 2012

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per (Km ²)
1	Kahayan Kuala	1.155	20.175	17
2	Sebangau Kuala	3.801	8.024	2
3	Pandih Batu	535,86	20.155	38
4	Maliku	413,14	23.374	57
5	Kahayan Hilir	360,00	26.813	74
6	Jabiren Raya	1.323,00	7.912	6
7	Kahayan Tengah	783,00	7.515	10
8	Banama Tingang	626,00	8.543	14
Jumlah Total		8.997	122.511	14
Tahun 2011			122.073	
Tahun 2010			119.983	

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Dari tabel 1 di atas, Kabupaten Pulang Pisau 2012 dengan jumlah penduduk 122.511 jiwa, pada 2011 sebanyak 122.073 jiwa dan 2010 sebanyak 119.983 jiwa, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pulang Pisau mengalami pertumbuhan sebesar 0,9 persen/per tahun. Kabupaten Pulang Pisau dengan luas wilayah 8.997 km² telah dilakukan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk infrastruktur jalan tiap tahun mengalami peningkatan, data BPS Kabupaten Pulang Pisau proporsi panjang jalan negara dalam kondisi baik, sedangkan jalan provinsi dalam kondisi baik sebanyak 40 km dan dalam kondisi rusak sebanyak 30 km, dan jalan kabupaten untuk jalan dengan kondisi baik sebanyak 347, 48 km, kondisi sedang sebanyak 263,51 km, kondisi rusak 218 km dan kondisi rusak berat sebanyak 113,63 km. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Status Jalan di Kabupaten Pulang Pisau (km) tahun 2011-2012

Jenis Permukaan	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Baik	119,50	119,50	97,00	97,00	330,84	347,48
Sedang	0,00	0,00	40,00	40,00	215,88	263,51
Rusak	0,00	0,00	30,00	30,00	218,00	218,11
Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	113,63
Jumlah (km)	119,50	119,50	167,00	167,00	884,66	942,73

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Dari Tabel 2, untuk jalan negara mulai dari tahun 2011 sampai 2012 dalam kondisi baik sekitar 100 persen, sedangkan untuk jalan provinsi sebanyak 58,08 persen dalam kondisi baik. Sementara itu, untuk jalan kabupaten hanya sebanyak 36,86 persen dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan semakin tinggi nilai proporsi panjang jalan akan memberikan dampak yang baik bagi penduduknya maupun untuk daerah tersebut dan pembangunan wilayah terhambat apabila tidak didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai atau jalan tersebut rusak. Selain mengukur panjang jalan menurut kondisi jalan. Hal lain yang perlu dilihat adalah Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau 2008-2012 untuk sektor perhubungan terdapat 9 (sembilan), yaitu jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio izin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah terminal angkutan umum, jumlah angkutan darat, persentase kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), lama pengujian kelayakan angkutan umum, dan pemasangan rambu-rambu dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.7	Perhubungan							
1.7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	jumlah	3.500,00	2.500,00	4.500,00	2.000,00	1.800,00	1.400,00
1.7.2	Rasio izin trayek	rasio	-	-	-	-	-	0,00
1.7.3	Jumlah uji kir angkutan umum	jumlah	199,00	148,00	228,00	336,00	540,00	488,00
1.7.4	Jumlah terminal angkutan umum	jumlah	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.7.5	Jumlah angkutan darat	jumlah	100,00	100,00	100,00	151,00	173,00	175,00
1.7.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	0,07	0,07	0,07	0,15	0,16	0,13
1.7.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
1.7.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Harga (Rp)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.9	Pemasangan rambu-rambu	Unit	0,00	154,00	48,00	98,00	208,00	0,00

Sumber : Lampiran Perda Kab Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2014

Dari Tabel 3, capaian untuk 2013 jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan sebesar -22,22 persen, jumlah uji kir angkutan umum mengalami penurunan sebesar -9,44 persen, sedangkan yang mengalami peningkatan yaitu jumlah angkutan darat sebesar 1,15 persen, persentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 6,25 persen. Melihat capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tersebut diperlukan upaya untuk melakukan peningkatan kinerja yang belum mencapai targetnya terutama indikator kinerja yang berdampak langsung pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 1 Kondisi Kabupaten Puang Pisau

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan merupakan agenda utama pembangunan yang harus diprioritaskan untuk dituntaskan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir untuk periode 2008-2013 di Kabupaten Pulang Pisau serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan pembangunan daerah jangka menengah di Kabupaten Pulang Pisau untuk masalah Infrastruktur wilayah, sebagai berikut :

1. tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata di tiap kecamatan;
2. kualitas jalan dan jembatan yang masih rendah;
3. jaringan irigasi yang masih sedikit; dan
4. akses air bersih yang masih kecil.

Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2006 - 2026 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau memuat arah kebijakan, sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan berbasis pada agribisnis dan agro industri;
3. meningkatkan pembangunan prasarana transportasi dan pembangunan Pelabuhan yang terintegrasi dengan pembangunan Kereta Api di Kalimantan Tengah;
4. mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;
5. mendorong kehidupan masyarakat yang tertib, taat hukum, dinamis dan demokratis, menghargai nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional; dan
6. mewujudkan Tata Pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Pengembangan Sektor Transportasi Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Kab...

Adapun sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau 2006 – 2026, sebagai berikut

1. meningkatnya kualitas sumber daya manusia
2. terwujudnya perekonomian daerah yang maju dengan berbasis pada agribisnis dan agro industri;
3. terbangunnya prasarana transportasi dan pelabuhan di Kabupaten Pulang Pisau yang terintegrasi dengan Kereta Api di Kalimantan Tengah;
4. berfungsinya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;
5. terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, taat hukum, dinamis dan demokratis, menghargai nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional; dan
6. terwujudnya tata Pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam menghitung proyeksi pendapatan daerah menggunakan data rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kurun waktu 2010-2012, yakni 11,17% per tahun. Dengan menggunakan data Perubahan APBD 2013 sebagai tahun dasar proyeksi dan mempertimbangkan bahwa perilaku serta karakteristik pertumbuhan masing-masing rincian obyek pendapatan yang bervariasi, maka diperoleh proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2014-2018 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2014-2018

No.	URAIAN	PERUBAHAN	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
			APBD 2013	APBD 2014	APBD 2015	APBD 2016	APBD 2017	
1	PENDAPATAN DAERAH	837.880,79	893.553,01	779.288,48	895.741,94	951.012,57	1.057.378,94	10,65
1.1	Pendapatan Asli Daerah	21.500,00	22.000,00	24.289,00	26.532,89	29.011,96	31.851,82	8,68
1.1.1	Pajak Daerah	5.889,00	6.189,00	6.807,90	7.468,69	8.237,96	9.061,31	9,02
1.1.2	Retribusi Daerah	8.811,00	9.711,00	9.582,10	10.463,20	11.324,30	12.195,40	7,28
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Diperoleh	1.800,00	1.400,00	1.899,00	1.764,80	1.809,99	2.122,85	8,71
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.800,00	6.600,00	6.210,00	6.856,80	7.820,15	8.272,17	8,18
0		0	0	0	0	0	0	
1.2	Data Perimbangan	541.115,89	595.991,39	669.299,95	791.160,34	842.648,86	945.613,79	11,80
1.2.1	Data Bagi Hasil Pajak/ Dana Lain	44.731,08	43.118,80	44.731,08	46.343,36	47.955,64	49.567,91	2,12
1.2.3	Data Alokasi Umum	453.776,68	504.012,06	569.534,76	643.974,26	727.038,94	821.780,69	12,61
1.2.4	Data Alokasi Khusus	42.607,93	48.810,52	55.034,11	61.242,70	67.454,29	73.665,85	11,59
0		0	0	0	0	0	0	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	75.224,81	75.801,82	76.799,52	78.048,71	79.351,74	80.711,32	1,47
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Data Daerah	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak (dari Prov. dan dari Pemerintah Daerah Lainnya)	29.109,21	29.513,82	21.539,51	22.816,48	23.747,31	24.934,67	8,40
1.3.4	Data Pengembalian dan Ganti Rugi	45.116,00	45.288,21	45.460,42	45.632,63	45.804,84	45.977,05	0,38
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pusat / Pemerintah Daerah Lainnya	9.799,60	9.799,60	9.799,60	9.799,60	9.799,60	9.799,60	-
1.3.6	Lain-lain Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pulang Pisau TA 2010– 2012, diolah

1. Peningkatan Aksesibilitas Daerah dan Transportasi

Kabupaten Pulang Pisau sebagai daerah yang baru berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Saat ini, kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 kecamatan, dan 99 desa. Dengan kondisi geografi yang sangat luas dan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti: jalan, transportasi, air, listrik yang masih sangat terbatas. Infrastruktur sektor transportasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah akan membuat perekonomian semakin maju, melalui penyediaan transportasi yang memadai akan semakin meningkatkan perekonomian daerah dan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau. Pada sektor transportasi laut terdapat 1 (satu) pelabuhan dimana arus lalu lintas barang melalui angkutan laut tercatat 1,16 juta ton, naik 0,17 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan terjadi pada volume bongkar barang sebesar 19,68 persen, sedangkan volume muat barang turun 8,25 persen. Dibandingkan bulan Mei 2016, jumlah kedatangan penumpang melalui angkutan udara turun 5,26 persen menjadi 56.918 orang. Penurunan juga terjadi pada jumlah keberangkatan penumpang sebesar 2,70 persen menjadi 60.180 orang. Berdasarkan data dan Informasi dari Kementerian Perhubungan terdapat 8 (delapan) bandar udara terletak di Kalimantan Tengah yaitu : 1. Bandar Udara Tjilik Riwut, 2. Bandar Udara Iskandar (Pangkalan Bun), 3. Bandar Udara H. Asan (Sampit), 4. Bandar Udara Beringin (Muara Teweh), 5. Bandar Udara Sanggu (Buntok), 6. Bandar Udara Sangkalemo (Kuala Kurun), 7. Bandar Udara Tumbang Samba (Tumbang Samba), 8 Bandar Udara Puruk Cahu. Untuk mendukung pertumbuhan penumpang di bandar udara yang berada di Kalimantan Tengah, maka bandar udara Tjilik Riwut Palangkaraya tahun 2015 melakukan pekerjaan pembangunan lanjutan dan perbaikan sebagai berikut.

Tabel 5 Pembangunan Bandar udara Tjilik Riwut Palangkaraya

No	Pekerjaan	Pagu Kegiatan (Rp)	Selesai
1	Lanjutan pembuatan inspection road di sekeliling areal bandara tebal 20 cm dari beton K-225 termasuk pengawasan	13.610.724.000	22 Desember 2015
2	Subsidi Angkutan Udara Perintis	14.601.030.000	31 Desember 2015
3	Perbaikan konstruksi runway (APBN-P)	19.000.000.000	-
4	Lanjutan pembangunan terminal penumpang baru bandara tjilik riwut termasuk pengawasan	93.062.155.000	-

Sedangkan Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun tahun 2015 melakukan pekerjaan pembangunan sebagai berikut.

Tabel 6 Pembangunan Bandar udara Iskandar Pangkalan Bun

No	Pekerjaan	Pagu Kegiatan (Rp)	Selesai
1	Perluasan apron baravo dan pelebaran taxiway baravo (APBN-P)	10.365.933.000	-

Bandar Udara H. Asan Sampit tahun 2015 melakukan pekerjaan pembangunan lanjutan sebagai berikut.

Tabel 7 Pembangunan Bandar udara H. Asan Sampit

No	Pekerjaan	Pagu Kegiatan (Rp)	Selesai
1	Pekerjaan Lanjutan perbaikan slope landas pacu dan turning area termasuk pengawasan	13.492.988.000	10 Desember 2015

Bandar Udara Kuala Kurun tahun 2015 melakukan pekerjaan pembangunan sebagai berikut.

Tabel 8. Pembangunan Bandar udara Kuala Kurun

No	Pekerjaan	Pagu Kegiatan (Rp)	Selesai
1	Lanjutan penataan sistem saluran drainase sisi udara	15.205.037.000	24 Oktober 2015

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui indikasi rencana program prioritas kebutuhan pendanaan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 memiliki prioritas program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 356 juta, peningkatan pelayanan angkutan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 132 juta, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 204 juta dan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 562 juta.

Tabel 9 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pulang Pisau 2014 – 2018 (dalam jutaan rupiah)

URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
			Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				2.037		2.326		2.687		3.080		3.562		13.681
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	506	90	578	90	667	90	765	90	882	90	3.398
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	300	90	342	90	396	90	454	90	523	90	2.015
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	30	90	34	90	40	90	45	90	52	90	201
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	90	90	103	90	119	90	136	90	157	90	604
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	20	90	23	90	26	90	30	90	35	90	134
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.400,00	4.257,00	270	5.000,00	308	5.240,00	356	5.782,00	408	6.201,00	471	6.201,00	1.813
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah uji kir angkutan umum	489,00	202,00	100	212,00	114	225,00	132	339,00	151	542,00	174	542,00	672
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah terminal angkutan umum	4,00	4,00	155	4,00	177	4,00	204	4,00	234	4,00	270	4,00	1.041
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemasangan rambu-rambu	0,00	120,00	426	136,00	487	148,00	562	100,00	644	205,00	743	205,00	2.862
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	80,00	85,00	25	90,00	29	95,00	33	97,00	38	99,00	44	99,00	168

Berdasarkan Tabel 9 di atas, dengan adanya program prioritas tersebut melalui indikasi rencana program serta kebutuhan pendanaan diharapkan dapat diwujudkan

Pengembangan Sektor Transportasi Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Kab...

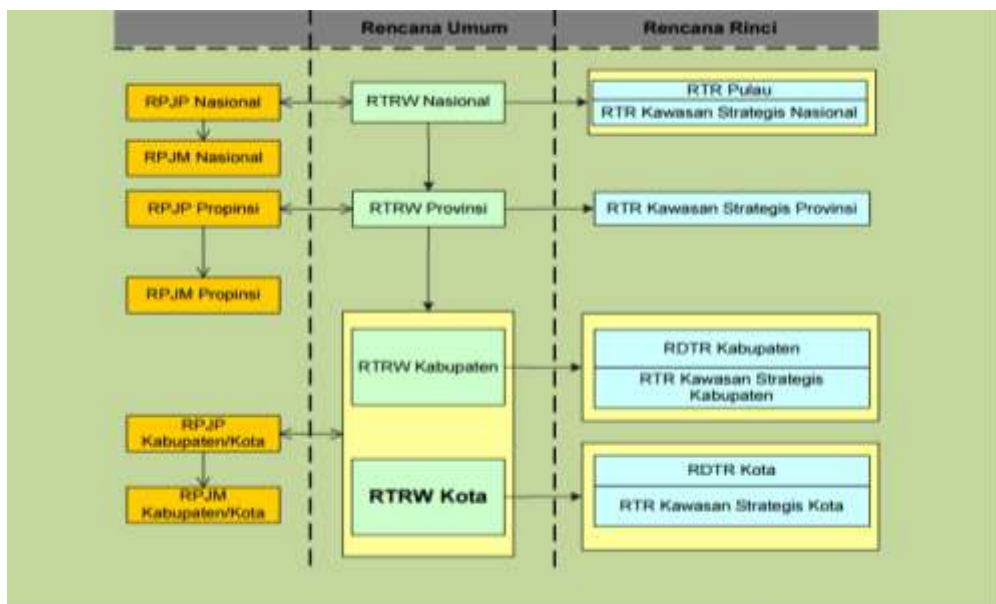
kebutuhan akan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan pembangunan pada sektor perhubungan selain melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan serta memberikan manfaat pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.



Gambar 2 Transportasi air di Kabupaten Pulang Pisau

2. Pembinaan Terhadap Tata Ruang Wilayah

Pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007, melalui peraturan tersebut sebagai pedoman penyusunan RTRW sebagai acuan semua pihak terkait yang menganut asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 6 pembinaan penataan ruang diselenggarakan untuk: a. meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang; b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang; c. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan d. meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang. Oleh karena itu, berdasarkan kedudukan RTRW secara rinci dapat digambarkan dalam gambar 3.



Gambar 3 Kedudukan RTRW

Berdasarkan rencana daerah tata ruang Kabupaten Pulang Pisau tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten, dimana tujuan penataan ruang Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012-2032 adalah “Terwujudnya ruang Kabupaten Pulang Pisau yang akomodatif terhadap

Pengembangan Sektor Transportasi Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Kab...

pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, berbasis pada kegiatan agrobisnis, dan berwawasan lingkungan”

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut

1. pemerataan pembangunan dalam upaya mengurangi kesenjangan dan keterbelakangan antar daerah di kabupaten;
2. pengembangan sektor pertanian menuju agrobisnis dan agroindustri;
3. pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk pengembangan ekonomi;
4. peningkatan kualitas lingkungan; dan
5. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Dalam rencana program prioritas Kabupaten Pulang Pisau telah disusun program prioritas dari tahun 2014-2018 seperti pada Tabel 10.

Tabel 10 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pulang Pisau 2014 – 2018

URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
			Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
Dinas Pekerjaan Umum		C												
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian pelayanan administrasi perkantoran	90	90	188.708	90	188.280	90	116.692	90	286.672	90	286.032	90	1.113.883
Program Pengkajian Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	674	90	770	90	680	90	1.019	90	1.175	90	4.508
Program Pengkajian Bangun Aparatur	Pemeliharaan bangunan gedung aparatur	90	90	100	90	114	90	130	90	181	90	174	90	872
Program Pengkajian Kapasitas Ruwan Daya Aparatur	Pemeliharaan sumber daya aparatur yang menjadi kebutuhan umum kabupaten	90	90	85	90	97	90	113	90	139	90	148	90	571
Program Pengkajian Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengelolaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	90	90	48	90	48	90	87	90	88	90	78	90	380
Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	Progres panjang jalan dan jalan tol	68,00	128	79.776	72,00	91.076	78,00	106.226	78,00	120.636	78,00	130.096	78,00	535.812
Program Pengembangan Sistem Drainase/Paralelkan	Progres drainase terakumulasi/pemeliharaan jalan air lokal	8,00	9,00	6.391	10,00	7.396	11,00	8.430	12,00	9.664	13,00	11.143	13,00	42.826
Program Pengembangan Tuntan/Tanah/Ruang	Pembangunan tuntas di wilayah akan penghubung dan akan penghubung jalan	80,00	80,00	*	80,00	*	80,00	*	80,00	*	80,00	*	80,00	*
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan penghubung dari kota ke kecamatan ke kecamatan pemukiman penduduk (internal desa) kota	68,00	68,00	2.226	72,00	2.540	74,00	2.936	76,00	3.364	78,00	3.879	79,00	4.343
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Capaian layanan sarana dan prasarana perkotaan	80,00	80,00	2.641	80,00	3.018	80,00	3.484	80,00	3.994	80,00	4.608	80,00	5.738
Program Pengembangan dan Pengkajian Jaringan Jalan, Ruang dan Prasarana Perkotaan	Luas ruang perkotaan dalam kota	60,00	66,00	16.860	70,00	18.840	74,00	21.787	78,00	24.888	82,00	28.773	83,00	110.830
Program Pengembangan Ruang Perkotaan dan Ruang Air	Perencanaan Ruang Tangga (RTT) terakumulasi air minum	13,00	14,00	9.557	15,00	10.911	16,00	12.607	17,00	14.483	18,00	16.664	19,00	64.197
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Ruang Terbuka	Perencanaan Wilayah Strategis dan Ruang Terbuka dengan infrastruktur pemukiman	70,00	73,00	7.800	78,00	8.882	77,00	8.890	79,00	11.341	82,00	13.076	82,00	60.370
Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	Perencanaan infrastruktur dalam kota	70,00	75,00	12.830	76,00	14.658	80,00	16.936	82,00	19.518	86,00	22.387	88,00	86.236
Program Pengembangan/Pengkajian Sarana dan Prasarana Umum (MHR, Damar)	Perencanaan umum dalam kota	80,00	82,00	20.420	84,00	23.312	86,00	26.934	88,00	30.679	90,00	35.604	90,00	127.150
Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya informasi mengenai Perencanaan Tata Ruang (PTR) wilayah kota secara komprehensif melalui peta digital dan peta digital	80,00	80,00	2.180	80,00	2.480	80,00	2.876	80,00	3.297	80,00	3.801	80,00	4.413
Program Perencanaan Ruang	Terwujudnya informasi mengenai Perencanaan Tata Ruang (PTR) wilayah kota secara komprehensif melalui peta digital dan peta digital	80,00	80,00	2.180	80,00	2.480	80,00	2.876	80,00	3.297	80,00	3.801	80,00	4.413
Program Pengembangan Perumahan	Perencanaan perumahan terakumulasi yang mencapai 100%	80,00	80,00	1.348	80,00	1.521	80,00	1.642	80,00	1.888	80,00	2.174	80,00	8.362
Program Pengembangan Rencana Perumahan	Perentase pemukiman campak 100%	16,40	35,00	1.770	46,00	3.021	50,00	3.335	60,00	2.677	70,00	4.060	70,00	11.888
Perencanaan pembangunan		C	C	8.800	C	8.704	C	11.212	C	12.804	C	14.601	C	87.070

sebesar Rp. 2.875.000.000,- dan program pemanfaatan ruang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.260.000.000,-

Penyusunan tata ruang wilayah di Kabupaten Pulang Pisau dalam menetapkan lokasi pembangunan perlu memperhatikan topografi di daerah tersebut, penetapan desain gambar (DED) dan Amdal perlu penetapan Pemerintah Kabupaten setempat serta dilakukan pengawasan oleh auditor internal.



Gambar 4 Kondisi buruk Kabupaten Pulang Pisau

3. Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting jaringan jalan dan penetapan status jaringan jalan serta SK Menteri PU No. 630 Tahun 2009, maka rencana sistem jaringan jalan Kabupaten Pulang Pisau yaitu, yaitu.

- Jaringan jalan strategis nasional rencana terdapat dalam SK Menteri PU No. 630 tahun 2009 nasional berupa jaringan jalan Bukit Rawi-Bgugus.
- Jaringan Jalan yang terdapat dalam SK Menteri PU No. 630 tahun 2009 tentang status jalan yang termasuk ruas jalan arteri primer, yaitu : Bereng Bengkel–Pilang (km 35); Pilang (km 35)-Pulang Pisau; dan Pulang Pisau-Batas Kota Kuala Kapuas.

- Jaringan jalan lokal primer, yaitu dari Maluku ke Kota Sebangau Permai; dari Bahaur menuju Pelabuhan Pengumpul Tanjung Sangiang di Kecamatan Kahayan Kuala. Untuk pembangunan dan peningkatan jalan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Kabupaten Pulang Pisau terdapat 5 (lima) indikasi program, seperti dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Untuk Meningkatkan Aksesibilitas

No	Indikasi Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
					2012-2017	2018-2022
1	Peningkatan jalan dan jembatan Nasional	Ruas Palangkaraya-Kuala Kapuas	APBN	Bina Marga		
2	Peningkatan jalan dan Provinsi	Ruas Palangkaraya-Buntok	APBD Prov	Bina Marga		
3	Pembangunan baru dan peningkatan ruas jalan dan jembatan kabupaten (kolektor sekunder dan jalan local)	Semua kondisi yang ada	APBD	Dinas PU		
4	Peningkatan dan pengembangan prasarana gudang barang (cargo)	Kec. Kahayan Hilir	Swasta	Dinas Perdagangan		
5	Peningkatan pembangunan terminal penumpang tipe B di PKL dan tipe C di PKLp	Kota Pulang Pisau, Kota Bahaur dan Kota Bukit Rawit	APBN APBD	Dinas Perhubungan		

Sumber : Dinas PU Kab. Pulang Pisau, 2012

Kabupaten Pulang Pisau dengan kondisi geografis alam dilalui oleh banyak sungai, untuk menghubungkan jalan antar wilayah dalam kabupaten ini memerlukan jembatan. Jembatan di wilayah ini terbuat dari kayu ulin dengan

panjang total 6.582 m dengan rincian kondisi baik 1.316,40 m (35%), kondisi sedang 2.961,90 m (45%) dan kondisi rusak berat 2.303,70 m (35%), sehingga diperlukan peningkatan jembatan dan konstruksinya. Sebagai contoh jembatan Pulau Mambulau dan Jembatan Cukai memiliki bentangan yang cukup lebar. Fondasinya terdiri dari pelat beton bertulang. Rangkanya dibuat dari kayu ulin (*Lauraceae eusideroxylon zwageri*). Sambungan-sambungan menggunakan baut pasak khusus. Pelat jalan kendaraan berfungsi juga sebagai batang tarik bergantung di bawah konstruksi bowstring rangka batang. Konstruksi bowstring rangka batang terdiri dari elemen-elemen bowstring berukuran 6.00/3.60/2.20 m dengan bobot 1.6 ton. Dengan derek semuanya diangkat dari tongkang dan disambungkan pada bagian-bagian yang sudah ada. Jembatan-jembatan ini pernah dibangun oleh STM-GKE Mandomai 1973-1976 di kota Pulang Pisau, Mandomai dan Kuala Kapuas. Jembatan-jembatan tersebut adalah Jembatan Gantung yang menghubungkan Desa Saka Mangkakai dan Kelurahan Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat. Kemudian Jembatan Pulau Mambulau yang menghubungkan Kelurahan Mambulau (Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas) dengan Desa Pulau Mambulau (Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas). Terakhir Jembatan Cukai yang menghubungkan Kelurahan Bereng Kalingu dan Kelurahan Pulang Pisau (Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau). Mengingat jembatan tersebut sudah sangat tua dan perlu keseriusan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memperbaiki jembatan sebagai penghubung antar kecamatan di Kab Pulang Pisau.

Gambar 5 Jembatan kabupaten Pulang Pisau



4. Peningkatan Pelayanan Transportasi

Pemusatan aktivitas dan pergerakan yang terjadi di Kabupaten Sragen mengakibatkan tingkat kebutuhan masyarakat akan adanya sistem transportasi tinggi. Pola penggunaan lahan yang terbentuk memusat akan menimbulkan suatu pergerakan yang diakibatkan faktor pemenuhan kebutuhan, yang harus dapat diwadahi dengan suatu sistem transportasi yang terdiri dari moda transportasi dan prasarana transportasi (Tamin, 1997:48). Hal tersebut memicu munculnya permintaan akan adanya sarana transportasi umum yang dalam hal ini adalah Angkutan Umum Penumpang (AUP) (Tamin dalam Angga Nursita Sari, 2008.). Oleh karena itu mengingat Kabupaten Pulang Pisau memiliki wilayah cukup luas dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 124.845 jiwa, sudah saatnya Kabupaten Pulang Pisau memiliki pelayanan angkutan umum. Adapun pelayanan angkutan umum di Kabupaten Pulang Pisau melalui Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) dengan tinjau ulang dan memperbaiki beberapa trayek yang ada di antaranya: Palangkaraya – Pulang Pisau – Banjarmasin; Pangkalan Bun – Pulang Pisau – Banjarmasin; Sampit – Pulang Pisau – Banjarmasin; Pulang Pisau – Palangkaraya; Pulang Pisau – Kuala Kapuas; Pulang Pisau – Bawan; Pulang Pisau – Bukit Rawi; Pulang Pisau – Pangkoh. Pelayanan angkutan antar kota tersebut ditunjang oleh keberadaan prasarana angkutan umum dan terminal, beberapa terminal yang ada di Kabupaten Pulang Pisau perlu terus diperbaiki kondisi dan kualitas pelayanannya di antaranya : Terminal tipe B Pulang Pisau (Terminal Ekan Penende); Terminal tipe C Bawan; Terminal tipe C Bukit Rawi; Terminal tipe C Pangkoh; Terminal tipe C Kanamit saat ini terminal berfungsi sebagai terminal bayangan. Terminal Pulang Pisau merupakan terminal terbesar, tingkat kedatangan dan keberangkatan rata-rata per tahun mencapai ± 40.000 orang, dari jumlah tersebut arus terbesar berasal dari trayek Pulang Pisau – Palangkaraya. Fasilitas terminal direncanakan sebagai berikut : terminal tipe B di Kota Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir; terminal tipe C di Kota Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala; terminal tipe C di Kota Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah; dan Jembatan timbang di Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah. Jaringan layanan lalu lintas, meliputi kota Palangkaraya – kota Pulang Pisau, kota Kapuas – kota Pulang Pisau, kota Kuala Kuron – kota Pulang Pisau. Sementara itu, sesuai RTRW Provinsi Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 20 poin 2E, terdapat 4 (empat) lokasi yang akan dijadikan wilayah

rencana pengembangan pelabuhan baru di Kalimantan Tengah, diantaranya Sebauai di Kobar, Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Pulau Damar di Kabupaten Katingan, dan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau. Pelayanan angkutan laut dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 terdapat pembangunan pelabuhan Tanjung Perawan di Kab. Pulang Pisau. Sementara itu, Pemerintah pusat menyetujui 3 (tiga) megaproyek pembangunan pelabuhan laut di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk dilaksanakan Pada anggaran 2016. Proyek senilai total Rp.3 triliun meliputi pelabuhan laut di Sebauai, Kotawaringin Barat (Kobar) senilai Rp1,2 triliun; Pelabuhan Pulau Damar, Katingan (Rp1,2 triliun); dan Pelabuhan Tanjung Perawan, Pulang Pisau (Rp.600 miliar). Pembangunan dermaga penyeberangan Pada 2016 berada di lokasi Desa Mintin dengan anggaran sebesar Rp. 19,5 Miliar. Rencana studi kelayakan dan prastudi kelayakan pembangunan pelabuhan laut dalam di Sebauai Kabupaten Kobar akan dikerjakan mulai tahun 2016. Studi dan prastudi tersebut itu merupakan proses awal dalam rencana pembangunan pelabuhan laut dalam dengan menggunakan APBD Kabupaten Kobar sekitar Rp.1,3 miliar dengan rincian anggaran kegiatan studi kelayakan sebesar Rp.700 juta, untuk prastudinya kelayakannya diperkirakan sebesar Rp.600 juta.

SIMPULAN

Kabupaten Pulang Pisau sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Kapuas memiliki permasalahan sumber daya manusia yang belum memadai, masalah administrasi yang belum tertata dengan baik, infrastruktur belum memadai serta sarana dan prasarana transportasi antardesa maupun desa ke kecamatan saat ini masih relatif sulit dan mahal. Oleh karena itu, potensi wilayah terdiri dari sumber daya alam yaitu tanaman pangan, peternakan dan perkebunan, sektor perikanan dan kelautan dan sektor pariwisata tetapi belum didayagunakan secara optimal. Dengan demikian, menyusun dan mengevaluasi perencanaan wilayah Kabupaten Pulang Pisau secara terpadu untuk dapat meningkatkan kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Selain itu, perlu juga meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi sebagai penghubung wilayah, sehingga ketersediaan sektor transportasi memadai dan menekan biaya kebutuhan pokok. Memelihara jalur transportasi sungai yang telah lama berjalan sebagai jalur urat nadi transportasi wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Strategi lain yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan aksesibilitas, yaitu (1) membentuk pola dan struktur ruang yang menunjang penyebaran ekonomi

dan penduduk; (2) mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi; (3) mengembangkan jaringan pelayanan transportasi; dan (4) menghubungkan simpul transportasi seperti terminal, pelabuhan dan bandar udara serta dermaga sungai dan penyeberangan dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Angga Nursita Sari, 2008. Evaluasi Rute Trayek Angkutan Umum Penumpang (AUP) Berdasarkan Persebaran Permukiman Di Kabupaten Sragen. Tugas Akhir. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Tengah, 2012. Kalimantan Tengah Dalam Angka.

Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau, 2008. Pelabuhan dan Dermaga di Kabupaten Pulang Pisau

Dinas PU - Bina Marga Kabupaten Pulang Pisau, 2013. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2013.(http://www.pulangpisaukab.go.id/images/Lelang_PBJ_2013/Pengumuman_Lelang_Fisik_7.pdf)

Kementerian Pekerjaan Umum, 2012. Peta Infrastruktur Kabupaten Pulang Pisau.

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013–2018.

(<http://askarteknik.wordpress.com/2013/03/06/panduan-moda-transportasi-indonesia/>)